



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Beli Pasir Rp 52 M Jadi Sorotan

- Temuan Anggota Fraksi PDI-P
- DPRD Setuju Revitalisasi Monas Rp 114 M

Gambir, Warta Kota

Heboh rencana anggaran DKI Jakarta yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 masih berlanjut. Kali ini giliran anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah yang menemukan rencana anggaran yang dinilai janggal.

Anggaran janggal tersebut ditemukan Ima saat menyisir anggaran Dinas Pendidikan. Ima adalah anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat yang mengurus bidang pendidikan.

Ima mengatakan, pekan lalu, ia melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ia kemudian meminta data anggaran dari dinas tersebut.

"Kita masih menelusuri. Aku dibantu sama tim penyisir anak magang Fraksi PDI-P, nemuin hal-hal, seperti contohnya pasir. Aku pikir ini kan bukan rehab. Di luar dari rehab ini bantuan BOP-BOS itu kita telusuri," kata Ima saat ditemui di ruangannya di lantai 7, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (7/11). Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu mengaku menemukan sejumlah anggaran janggal seperti anggaran untuk pasir senilai Rp 52,16 miliar.

Ima menyoroti hal itu. Ia bingung lantaran anggaran pasir itu masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan SMP dan SMK. "Ini pasir di situ tertulisnya untuk alat peraga sekolah. Totalnya Rp 52 miliar buat apa itu? Dia di SMKN (jurusan) bisnis manajemen.

Memangnya bisnis manajemen ada pasirnya?" ujarnya.

Ia mengungkapkan, anggaran pasir tersebut masuk dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat. "Jadi pasir itu adanya di koloman aja di penyediaan BOP SMPN terus ada di BOP SMK jurusan bisnis manajemen terus ada lagi di BOP SMK teknologi pengadaan pasir ini nih. Terus ada lagi di wajib belajar 12 tahun, enggak tahu apa yang digunakan dari pasir," tutur dia.

Kampung kumuh

Sebelumnya, salah satu yang paling mencuat ke publik adalah soal anggaran pengadaan lem aibon. Dalam KUA-PPAS tertulis pengadaan lem aibon anggarannya mencapai Rp 82 miliar. Isu tersebut mencuat setelah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengunggah kejanggalan itu di sosial media.

Anggaran yang dinilai tak realistis juga yang terkait program penataan kampung kumuh. Anggarannya juga menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai bahwa anggaran yang dikucurkan untuk penataan kampung kumuh terlalu besar. Politisi PDI-P itu kemudian meminta revisi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta untuk membuat anggaran yang lebih masuk akal.

"Mereka harus ada revisi (anggaran), kalau tidak ya kami coret," ujar Ida saat ditemui di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11).

Dana yang digelontorkan untuk penataan 76 Rukun Warga (RW) dinilai masih terlalu fantastis. Untuk kajian saja, Pemprov DKI Jakarta

mengusulkan anggaran Rp 500 juta sampai Rp 600 juta per RW.

Sedangkan anggaran program penataan kampung kumuh yang diberi istilah community action plan (CAP) sendiri diusulkan dengan biaya Rp 4 miliar hingga Rp 20 miliar per RW. "Dengan kajian Rp 600 juta kemudian anggaran Rp 10 miliar jadi (total) Rp 10,6 miliar (per RW)," jelas Ida.

Dipugar ulang

Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan anggaran sebesar Rp 114,47 miliar untuk revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) yang diajukan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta.

Persetujuan itu diperoleh dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

"Kami setuju, Monas tadi anggarannya... Rp 114 miliar," kata Ketua Komisi D DPRD Ida Mahmudah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Menurut Ida, anggaran tersebut disetujui untuk perbaikan-perbaikan di sekitar kawasan Monas.

Sebelumnya anggaran revitalisasi dipegang oleh Unit Pengelola Teknis (UPT) Monas. Kini revitalisasi diambil alih oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata).

"Ini kan sekali lagi pembahasan KUA-PPAS, jadi rancangan pembiayaan kami setujuin, rinciannya nanti setelah bulan ini nanti akan rapat khusus. Nanti kami detailkan apa saja sih yang dari 100 sekian itu untuk kegiatan di Monas," ujar Ida.

Kepala Dinas Citata DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan, pemugaran kawasan bersejarah dibagi menjadi tiga bagian yakni desain lanskap, desain interior, dan perawatan kawasan setelah tuntas dipoles.

Terkait dengan Monas, kondisi interior tugu Monas, kata Heru, harus dipugar ulang. Hal itu bertujuan untuk menarik minat wisatawan. "Interior di dalam Monas kondisinya harus dibuat lebih baik lagi, sehingga tujuan destinasi itu akan lebih bagus," ujarnya.

Dokumen dibuka

Sementara itu Pimpinan DPRD DKI Jakarta berencana bakal melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini menyusul belum dibukanya draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 di website resmi apbd.jakarta.go.id.

"Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat kepada gubernur agar dokumen tersebut dibuka, untuk dibahas bersama dan disahkan sesuai dengan ketentuan," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Rabu (6/11).

Menurut dia, DPRD memiliki hak dan kewajiban dalam penganggaran daerah. Karena itu, bila ada anggaran yang janggal dan menjadi kehebohan di publik, pemerintah harus memberikan penjelasan detail dan terbuka kepada legislator.

"Mari luruskan dengan pembahasan bersama, agar anggaran tersebut matang dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya. (fai/Kompas.com)